

**PEMETAAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA TANGERANG PROVINSI
BANTEN**

**Oleh :
Agus Sjafari
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

agussjafari@yahoo.com

ABSTRACT

Social conflict mapping research aims to map social conflict problems in Tangerang City, including: conflict issues, scene, time of events and actors / stakeholders, and causes of conflict, chronology / events, impacts, and conflict resolution process. Tangerang City is an area with a very heterogeneous population that has considerable potential for conflict due to differences in value system, cultural differences, different interests. Potential social conflict and relatively high social intensity in Tangerang City are (1) Labor Conflicts with some companies; (2) Conflict related to the rejection of the establishment of the place of worship that is in the form of rejection of the church building; And (3) Conflict in the form of Unis students demand related to the National Education System act and the elimination of low wages

Keywords: Mapping, Social Conflict

ABSTRAK

Penelitian pemetaan konflik sosial bertujuan untuk memetakan masalah konflik sosial di Kota Tangerang yang meliputi: isu konflik, tempat kejadian, waktu kejadian dan pelaku/aktor/para pihak, serta penyebab konflik, kronologis/kejadian, dampak yang ditimbulkan, serta proses penyelesaian konflik. Kota Tangerang merupakan wilayah yang penduduknya sangat heterogen memiliki potensi konflik yang cukup besar terkait dengan adanya perbedaan sistem nilai, perbedaan kultur, perbedaan kepentingan. Konflik sosial potensial dan memiliki intensitas sosial yang relatif tinggi di Kota Tangerang adalah (1) Konflik Buruh dengan beberapa perusahaannya; (2) Konflik terkait dengan penolakan terhadap berdirinya tempat peribadatan yaitu dalam bentuk penolakan terhadap pembangunan gereja; dan (3) Konflik berupa tuntutan mahasiswa Unis terkait dengan UU Sisdiknas dan penghapusan upah murah.

Kata Kunci : Pemetaan, Konflik Sosial

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnisitas maupun budaya serta agama dan kepercayaannya. Kemajemukan juga menjangkau pada tingkat kesejahteraan ekonomi, pandangan politik serta kewilayahan, yang semua itu sesungguhnya memiliki arti dan peran strategis bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, secara bersamaan kemajemukan masyarakat itu juga bersifat dilematis dalam kerangka penggalan, pengelolaan, serta pengembangan potensi bagi bangsa Indonesia untuk menapaki jenjang masa depannya. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama. Sebaliknya, jika kemajemukan masyarakat tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menyuburkan berbagai prasangka negatif (*negative stereotyping*) antar individu dan kelompok masyarakat yang akhirnya dapat merenggangkan ikatan solidaritas sosial.

Ciri utama masyarakat majemuk (*plural society*) menurut Furnifall (1940) adalah kehidupan masyarakatnya berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka (secara essensi) terpisahkan oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial yang melekat pada diri mereka masing-masing serta tidak tergabungnya mereka dalam satu unit politik tertentu.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi di masyarakat, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Dewasa ini konflik sosial di Indonesia semakin terlihat nyata. Konflik ini merupakan bagian dari ancaman nasional. Konflik sosial tersebut apabila dibiarkan akan menjadi bencana sosial yang mengganggu stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik Sosial di picu oleh berbagai hal diantaranya perbedaan persepsi

masalah politik, kesenjangan ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan, SARA dan isu lainnya.

Dengan semakin tingginya tensi konflik yang terjadi di Indonesia saat ini, perlu adanya langkah – langkah kongkrit dari semua pihak khususnya dari pemerintah untuk meminimalisir meluasnya konflik yang akan mengganggu terhadap terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu salah satu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan adalah kegiatan pemetaan konflik sosial.

Provinsi Banten khususnya Kota Tangerang merupakan wilayah yang penduduknya sangat heterogen dikhawatirkan memiliki potensi konflik yang cukup besar terkait dengan adanya perbedaan sistem nilai, perbedaan kultur, perbedaan kepentingan dari berbagai penduduknya sehingga kegiatan pemetaan daerah rawan konflik sosial menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dilakukan.

B. Maksud dan tujuan

Kegiatan penelitian pemetaan sosial bertujuan di Kota Tangerang untuk memetaan masalah konflik sosial di Kota Tangerang yang meliputi: isu konflik, tempat kejadian, waktu kejadian dan pelaku/aktor/para pihak serta dampak yang ditimbulkan, penyebab konflik, proses penyelesaian, kronologis/kejadian, serta menghimpun informasi yang berkaitan dengan data pendukung dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya .

C. Keluaran yang Diharapkan

Dalam upaya mencapai tujuan kegiatan penelitian tentang pemetaan konflik sosial tersebut, terdapat beberapa output yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

1. Data dan informasi serta analisis tentang jenis konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Tangerang sehingga memudahkan berbagai pihak dalam merumuskan berbagai bentuk kebijakan yang perlu diambil dalam rangka pengurangan resiko konflik sosial.
2. Peta daerah rawan konflik sosial yang dapat digunakan sebagai referensi bagi multi *stakeholders* terkait jenis dan penyebaran konflik kekerasan di Indonesia khususnya di Kota Tangerang.

3. Analisis Peta daerah rawan konflik sosial yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rekomendasi terkait dengan jenis dan penyebaran konflik sosial di Indonesia khususnya di Kota Tangerang.

D. Kerangka Teori

1) Konsep Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan bagian dari suatu kehidupan di dunia yang kadang tidak dapat dihindari. Konflik sosial umumnya bersifat negatif, karena ada kecenderungan antara pihak-pihak yang terlibat konflik sosial saling bertentangan dan berusaha untuk saling meniadakan atau melenyapkan. Dalam hal ini yang bertentangan dianggap sebagai lawan atau musuh. Di sinilah letak perbedaan konflik sosial dengan rivalitas atau persaingan. Meskipun dalam rivalitas terdapat kecenderungan untuk mengalahkan, namun tidak mengarah pada saling meniadakan saingan atau kompetitor. Saingan atau tidak dianggap musuh yang harus dilenyapkan. Untuk memahami lebih dalam mengenai konflik sosial, cobalah kerjakan aktivitas berikut ini.

Menurut Minnery, mendefinisikan konflik sosial sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan di mana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut (Minnery 1986, hal 35).

Dalam sosiologi konflik sosial disebut juga pertikaian atau pertentangan. Pertikaian adalah bentuk persaingan yang berkembang secara negatif. Hal ini berarti satu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau berusaha menyingkirkan pihak lainnya. Dengan kata lain, pertikaian merupakan usaha penghapusan keberadaan pihak lain. Pengertian ini senada dengan pendapat Soedjono. Menurut Soedjono (2002:158), pertikaian adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana pihak yang satu berusaha menjatuhkan pihak yang lain atau berusaha mengenyahkan rivalnya.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1989:86), pertentangan atau pertikaian atau konflik sosial adalah suatu proses yang dilakukan orang atau

kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu, konflik sosial diidentikkan dengan tindak kekerasan.

Konflik dapat pula diartikan sebagai suatu perjuangan memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan sebagainya guna memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, setiap pihak yang berkonflik berusaha menundukkan saingannya dengan menggunakan segala kemampuan yang dimiliki agar dapat memenangkan konflik tersebut. Tindak kekerasan dianggap tindakan yang tepat dalam mendukung individu mencapai tujuannya. Dalam arti mudah, konflik didefinisikan sebagai perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara dua atau lebih pihak yang mempunyai objek yang sama dan membawa pada perpecahan.

Menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial memberi pengertian bahwa konflik sosial, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

2) Penyebab Konflik Sosial

a. Perbedaan Antarorang

Pada dasarnya setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda- beda. Perbedaan ini mampu menimbulkan konflik sosial. Perbedaan pendirian dan perasaan setiap orang dirasa sebagai pemicu utama dalam konflik sosial. Lihat saja berita-berita media massa banyak pertikaian terjadi karena rasa dendam, cemburu, iri hati, dan sebagainya. Selain itu, banyaknya perceraian keluarga adalah bukti nyata perbedaan prinsip mampu menimbulkan konflik. Umumnya perbedaan pendirian atau pemikiran lahir karena setiap orang memiliki cara pandang berbeda terhadap masalah yang sama.

b. Perbedaan Kebudayaan

Kebudayaan yang melekat pada seseorang mampu memunculkan konflik manakala kebudayaan – kebudayaan tersebut berbenturan dengan kebudayaan lain. Pada dasarnya pola kebudayaan yang ada memengaruhi pembentukan serta perkembangan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, kepribadian antara satu individu dengan individu lainnya berbeda-beda. Contoh, seseorang yang tinggal di lingkungan pegunungan tentunya berbeda dengan seseorang yang tinggal di pantai. Perbedaan kepribadian ini, tentunya membawa perbedaan pola pemikiran dan sikap dari setiap individu yang dapat menyebabkan terjadinya pertentangan antarkelompok manusia.

c. Bentrokan Kepentingan

Umumnya kepentingan menunjuk keinginan atau kebutuhan akan sesuatu hal. Seorang mampu melakukan apa saja untuk mendapatkan kepentingannya guna mencapai kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, apabila terjadi benturan antara dua kepentingan yang berbeda, dapat dipastikan munculnya konflik sosial. Contohnya benturan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Kepentingan buruh adalah mendapatkan gaji sebagaimana mestinya setiap bulannya. Namun, berkenaan dengan meruginya sebuah perusahaan maka perusahaan itu enggan memenuhi kepentingan buruh. Akibatnya, konflik baru terbentuk antara majikan dan buruh. Buruh menggelar aksi demo dan mogok kerja menuntut perusahaan tersebut.

d. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang berlangsung cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendirian antargolongan dalam menyikapi perubahan yang terjadi. Situasi dan kondisi ini mampu memunculkan konflik baru. Misalnya semakin maju dan tinggi teknologi, para ahli pun berusaha melibatkan para balita untuk ikut menikmati teknologi tersebut yang tentunya bermanfaat bagi perkembangan intelektual bayi. Karena alasan itu, dibuatlah baby channel. Namun, perubahan ini menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat (Dahrendorf, 1986)

3) **Macam – Macam Konflik Sosial**

a. **Konflik Pribadi**

Konflik terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain. Umumnya konflik pribadi diawali perasaan tidak suka terhadap orang lain, yang pada akhirnya melahirkan perasaan benci yang mendalam. Perasaan ini mendorong tersebut untuk memaki, menghina, bahkan memusnahkan pihak lawan. Pada dasarnya konflik pribadi sering terjadi dalam masyarakat.

b. **Konflik Rasial**

Konflik rasial umumnya terjadi di suatu negara yang memiliki keragaman suku dan ras. Lantas, apa yang dimaksud dengan ras? Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya, seperti bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, dan warna rambut. Secara umum ras di dunia dikelompokkan menjadi lima ras, yaitu Australoid, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan ras-ras khusus. Hal ini berarti kehidupan dunia berpotensi munculnya konflik juga jika perbedaan antar-ras dipertajam.

c. **Konflik Antarkelas Sosial**

Terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Kesemua itu menjadi dasar penempatan seseorang dalam kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan berada pada posisi bawah. Dari setiap kelas mengandung hak dan kewajiban serta kepentingan yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut mampu memicu munculnya konflik rasial.

d. **Konflik Politik Antargolongan dalam Satu Masyarakat maupun antara Negara-Negara yang Berdaulat**

Dunia perpolitikan pun tidak lepas dari munculnya konflik sosial. Politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Konflik politik terjadi karena setiap golongan di masyarakat melakukan politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama. Karena perbedaan inilah, maka peluang terjadinya konflik antargolongan terbuka lebar. Contoh rencana undang-undang pornoaksi dan pornografi sedang diulas, masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua pemikiran, sehingga terjadi pertentangan antara kelompok masyarakat yang setuju dengan kelompok yang tidak menyetujuinya.

e. **Konflik Bersifat Internasional**

Konflik internasional biasanya terjadi karena perbedaan-perbedaan kepentingan di mana menyangkut kedaulatan negara yang saling berkonflik. Karena mencakup suatu negara, maka akibat konflik ini dirasakan oleh seluruh rakyat dalam suatu negara. Apabila kita mau merenungkan sejenak, pada umumnya konflik internasional selalu berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan pada akhirnya menimbulkan perang antarbangsa (Dahrendorf, 1986)

4) Akibat Konflik Sosial

a. **Bertambahnya Solidaritas Anggota Kelompok yang Berkonflik**

Jika suatu kelompok terlibat konflik dengan kelompok lain, maka solidaritas antarwarga kelompok tersebut akan meningkat dan bertambah berat. Bahkan, setiap anggota bersedia berkorban demi keutuhan kelompok dalam menghadapi tantangan dari luar.

b. **Jika Konflik Terjadi pada Tubuh Suatu Kelompok maka akan Menjadikan Keretakan dan Keguncangan dalam Kelompok tersebut**
Visi dan misi dalam kelompok menjadi tidak dipandang lagi sebagai dasar penyatuan. Setiap anggota berusaha menjatuhkan anggota lain dalam kelompok yang sama, sehingga dapat dipastikan kelompok tersebut tidak akan bertahan dalam waktu yang lama.

c. **Berubahnya Kepribadian Individu**

Dalam konflik sosial biasanya membentuk opini yang berbeda, misalnya orang yang setuju dan mendukung konflik, ada pula yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak, ada pribadi-pribadi yang tahan menghadapi situasi konflik, akan tetapi ada yang merasa tertekan, sehingga menimbulkan penderitaan pada batinnya dan merupakan suatu penyiksaan mental. Keadaan ini dialami oleh orang-orang yang lama tinggal di Amerika Serikat. Sewaktu Amerika Serikat diserang mendadak oleh Jepang dalam Perang Dunia II, orang-orang Jepang yang lahir di Amerika Serikat atau yang telah lama tinggal di sana sehingga mengambil kewarganegaraan Amerika Serikat, merasakan tekanan-tekanan tersebut. Kondisi ini mereka alami karena kebudayaan Jepang masih merupakan bagian dari hidupnya dan banyak pula saudara-saudaranya yang tinggal di Jepang, sehingga mereka pada umumnya tidak dapat membenci Kerajaan Jepang seratus persen seperti orang-orang Amerika asli.

d. Hancurnya Harta Benda dan Jatuhnya Korban Jiwa.

Setiap konflik yang terjadi umumnya membawa kehancuran dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak yang berkonflik mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan pertikaian. Oleh karenanya, tidak urung segala sesuatu yang ada di sekitar menjadi bahan amukan. Peristiwa ini menyebabkan penderitaan yang berat bagi pihak-pihak yang bertikai. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa wujud nyata akibat konflik. Akomodasi, Dominasi, dan Takluknya Salah Satu Pihak. Jika setiap pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan seimbang, maka muncullah proses akomodasi. Akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Ketidakseimbangan antara kekuatan-kekuatan pihak yang mengalami konflik menyebabkan dominasi terhadap lawannya. Kedudukan pihak yang didominasi sebagai pihak yang takluk terhadap kekuasaan lawannya (Dahrendorf, 1986)

E. Pembahasan

Secara umum pada dasarnya Kota Tangerang tidak memiliki konflik sosial yang dikategorikan sebagai konflik sosial dalam skala besar apalagi nasional. Secara lebih spesifik, konflik sosial yang terjadi di Kota Tangerang sebagian besar terkait dengan konflik ekonomi khususnya pemenuhan kebutuhan hidup pekerja atau buruh, namun terdapat beberapa konflik yang dapat dikategorikan sebagai konflik SARA.

Terdapat 3 (tiga) jenis konflik sosial yang dikategorikan dominan yang terjadi di Kota Tangerang selama kurang lebih dalam 1 (satu) tahun terakhir ini yaitu : (1) Konflik Buruh dengan beberapa perusahaannya; (2) Konflik terkait dengan penolakan terhadap berdirinya tempat peribadatan yaitu dalam bentuk penolakan terhadap pembangunan gereja; dan (3) Konflik berupa tuntutan mahasiswa Unis terkait dengan UU Sisdiknas dan penghapusan upah murah.

Dari ketiga jenis konflik sosial tersebut, konflik buruh dan penolakan pendirian tempat ibadah yang termasuk sekala lebih besar dibandingkan dengan konflik seputar tuntutan mahasiswa. Khususnya konflik tuntutan buruh hampir terjadi sepanjang tahun yang dilakukan oleh beberapa buruh terhadap beberapa perusahaan tempat mereka bekerja. Khusus terkait dengan konflik buruh dengan beberapa perusahaannya tersebut, terdapat beberapa kasus yang dikategorikan sebagai pemicu konflik tersebut antara lain:

1. Upah dan kesejahteraan buruh yang rendah;
2. Konflik antara buruh dan pihak HRD, terkait kebijakan pihak HRD yang dianggap merugikan pihak buruh;
3. Konflik antara buruh dengan pihak General Manajer terkait dengan penundaan uang lembur dan tuntutan untuk mencabut *out sourcing*;
4. Masalah sisa pembayaran gaji yang belum dibayar;
5. Masalah pemberlakuan asuransi buruh yang belum efektif;
6. Tuntutan mempekerjakan kembali beberapa buruh yang diskorsing oleh perusahaan;
7. Tuntutan perubahan status pekerja dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap;

8. Buruh menuntut penolakan terhadap penolakan harga BBM;
9. Pemberian uang THR; dan
10. Pemberlakuan cuti hamil/haid yang belum efektif.

Sedangkan terkait dengan konflik penolakan terhadap berdirinya tempat peribadatan khususnya pendirian gereja, terdapat beberapa topik masalah yang dapat dikategorikan sebagai pemicu konflik sosial antara lain:

1. Pembangunan gereja yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perijinan;
2. Kegiatan kebaktian dengan menggunakan KTP palsu;
3. Penggunaan gedung serbaguna dan beberapa ruko dijadikan gereja; dan
4. Adanya jumlah jemaah kebaktian yang tidak sesuai dengan jumlah warga.

Khusus terkait dengan adanya kegiatan demonstrasi atau tuntutan mahasiswa Unis, terdapat beberapa isu yang dijadikan sebagai pemicu dari konflik sosial tersebut antara lain:

1. Tuntutan untuk mencabut UU Sisdiknas;
2. Tuntutan penghapusan politik upah murah oleh perusahaan; dan
3. Tuntutan pemberlakuan keamanan nasional.

1. Analisis Intensitas Kejadian Konflik

a. Aksi Unjuk Rasa Buruh Perusahaan di Kota Tangerang.

Terjadinya aksi unjuk rasa karyawan tetap dan buruh beberapa perusahaan di Kota Tangerang yang tergabung dalam wadah serikat organisasi buruh sangat mengganggu terhadap kondisi sosial masyarakat di Kota Tangerang. Terjadinya aksi unjuk rasa buruh di beberapa perusahaan di Kota Tangerang dikarenakan adanya perubahan upah minimum kerja di wilayah Kota Tangerang dan didorong pula belum adanya kenaikan gaji selama 6 (enam) tahun, sehingga para karyawan tetap di beberapa perusahaan menuntut kenaikan gajinya. Selain itu aksi juga dilatarbelakangi adanya kesenjangan sosial, terutama kesejahteraan antara karyawan biasa dengan karyawan level manajer tingkat menengah serta tidak adanya komunikasi yang transparan antara pihak perusahaan dengan karyawannya, terutama tentang profit dari hasil penjualan produksi. Apabila tidak ada kata sepakat antara pihak manajemen perusahaan dengan karyawan tetap, maka dimungkinkan

akan terjadi mogok kerja besar – besaran yang akan diikuti oleh seluruh karyawan tetap beberapa perusahaan yang jumlahnya sekitar ribuan orang. Mencermati hal tersebut, apabila ancaman aksi mogok tersebut dilakukan, maka dikhawatirkan akan melumpuhkan seluruh aktifitas produksi beberapa perusahaan yang ada di Kota Tangerang, yang berakibat merugikan keuangan Negara dan juga masyarakat secara umum.

b. Konflik Penolakan Terhadap Berdirinya Tempat Peribadatan Gereja

Intensitas Konflik Penolakan Terhadap Berdirinya Tempat Peribadatan Gereja di wilayah Sudimara, Kec. Pinang sangat tinggi selama tahun 2013 – 2014 khususnya pada pertengahan tahun sampai dengan sekarang ini. Masyarakat di sekitar wilayah tersebut menganggap bahwa wilayah tersebut sangat tidak layak untuk didirikan sebuah tempat peribadatan, mengingat jumlah penduduk yang menganut agama katolik yang ada di wilayah tersebut masih sangat sedikit dan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait dengan layaknya pendirian tempat peribadatan yang ditentukan oleh warga. Hal yang justru menjadi pemicu konflik tersebut adalah bahwa Yayasan Tarakanita sebagai pengurus pendirian gereja tersebut telah memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang dikeluarkan oleh Walikota Wahidin Halim. Dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan IMB tersebut karena secara formal pendirian peribadatan gereja tersebut sudah mendapatkan “persetujuan” dari warga setempat dengan melampirkan sejumlah KTP warga sebagai bentuk “dukungan” terhadap berdirinya gereja tersebut. Menurut beberapa tokoh masyarakat bahwa pengumpulan KTP warga tersebut dimobilisasi oleh ketua RT dan RW, meskipun menurut pengakuan dari beberapa warga bahwa mereka tidak mengetahui bahwa pengumpulan KTP tersebut sebagai syarat untuk pembangunan tempat peribadatan gereja. Saat ini masyarakat masih terus mengawasi kondisi tempat tersebut dikarenakan adanya kesepakatan diantara tokoh masyarakat, perwakilan dari panitia pembangunan gereja, dan perwakilan dari Pemerintah Kota bahwa pembangunan gereja tersebut dihentikan sampai dengan proses pengadilan diputuskan, dikarenakan pihak masyarakat yang diwakili

oleh Forum Umat Islam Bersatu saat ini sedang mengajukan perkara ke PTUN terkait keluarnya surat IMB terkait pendirian Gereja oleh Walikota Wahidin Halim

Bentuk kesepakatan tersebut keluar pada pada Hari Jumat, 14 Mei 2014 yang diadakan di Ruang Rapat Ahklakul Karimah Lt.3 Gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang, yang ditandatangani oleh M. Nursalim (Forum Umat Islam Bersatu Sudimara), Maria Ratnaningsih (Wakil Ketua Dewan Paroki Gereja Santa Bernedet), Ignatius Sahat Manalu (Ketua Panitia Pembangunan Gereja Santa Bernedet), dan diketahui oleh Drs.H.Saeful Rohman,M.Si (Asisten Tata Pemerintah Kota Tangerang). Bentuk kesepakatan tersebut disamping dibuat secara tertulis, tetapi juga dibuat dalam bentuk spanduk seperti halnya surat kesepakatan yang telah dibuat (terlampir).

Potensi konflik terkait kasus ini saat ini sedang menunggu dan saling mengawasi. Ketika salah satu pihak melanggar dari kesepakatan tersebut, maka potensi konfliknya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Hal yang juga dikhawatirkan adalah ketika pihak pihak pengadilan menolak gugatan dari Forum Umat Islam Bersatu Sudimara atau dengan kata lain mengizinkan pembangunan gereja tersebut, maka konflik juga akan terjadi.

c. Konflik Aksi Demonstrasi Mahasiswa Unis

Terkait dengan aksi demonstrasi mahasiswa Unis Tangerang yang mengangkat isu tentang pendidikan dan ketenagakerjaan, intensitasnya tidak terlalu besar. Demonstrasi tersebut sifatnya hanya temporer terkait dalam memperingati Hari Buruh Internasional yang kebetulan berdekatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kedua isu tersebut (pendidikan dan ketenagakerjaan) dianggap sebagai isu yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan beberapa pihak lainnya. Aksi demonstrasi tersebut sepertinya akan terjadi setiap tahun sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian mahasiswa untuk turut serta memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan pendidikan yang layak dan persoalan ketenagakerjaan kita. Pengaruh yang tampak dengan aksi tersebut hanya berkisar kepada kaum buruh yang ada di wilayah Kota Serang, meskipun tidak sebanyak ketika buruh secara nasional melakukan aksi demonstrasi.

2. Analisa Dampak Konflik

Dalam menjelaskan dampak dari konflik sosial yang terjadi di Kota Tangerang, kami ingin menjelaskan secara simultan terkait dengan penyebab konflik, jenis konflik dan dampak dari konflik social itu sendiri.

a. Dilihat dari penyebab konflik

Terkait dengan konflik aksi demonstrasi karyawan dan buruh perusahaan, konflik pembangunan tempat peribadatan gereja, dan konflik demonstrasi mahasiswa Unis, maka dilihat dari penyebab konflik termasuk dalam jenis konflik sosial yang tergolong ke dalam Bentrokan (konflik) Kepentingan. Umumnya Bentrokan (konflik) Kepentingan menunjuk keinginan atau kebutuhan akan sesuatu hal. Seorang mampu melakukan apa saja untuk mendapatkan kepentingannya guna mencapai kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, apabila terjadi benturan antara dua kepentingan yang berbeda, dapat dipastikan munculnya konflik sosial.

1). Aksi Karyawan/Buruh Perusahaan yang menuntut Kesejahteraan merupakan konflik sosial atau benturan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Kepentingan buruh adalah mendapatkan gaji sebagaimana mestinya setiap bulannya. Namun, berkenaan dengan meruginya sebuah perusahaan maka perusahaan itu enggan memenuhi kepentingan buruh. Akibatnya, konflik baru terbentuk antara majikan dan buruh. Buruh menggelar aksi demo dan mogok kerja menuntut perusahaan tersebut. Dalam konteks tersebut antara perusahaan idealnya harus bersikap transparan terhadap buruh terkait dengan produktivitas dan keuntungan dari perusahaan, dengan demikian buruh akan mengetahui secara jelas tentang kondisi dan kekuatan perusahaan di dalam memenuhi tuntutan buruh tersebut.

2). Konflik Pembangunan Tempat Peribadatan Gereja termasuk juga dalam konflik (bentrokan) kepentingan. Konflik kepentingan dalam masalah ini adalah konflik antara kepentingan sekelompok kecil orang atau masyarakat, dalam hal ini para penganut agama katolik dengan kepentingan sekelompok besar orang atau masyarakat yang ada di wilayah tersebut yang sebagian besar beragama islam. Dasar kepentingannya adalah terbagi dalam dua macam. Bagi sekelompok

masyarakat kecil penganut agama katolik, kepentingan di sini terkait dengan kebutuhan menjalankan ibadah, sedangkan bagi sekelompok masyarakat besar (masyarakat pada umumnya) kepentingannya adalah mereka merasa terusik dengan keberadaan gereja tersebut. Di samping itu sebagian besar masyarakat menganggap bahwa masyarakat asli (penduduk) penganut agama katolik yang ada di wilayah tersebut masih sedikit, sehingga tidak perlu mendirikan gereja sendiri dan dapat melaksanakan peribadatnya yang ada di Kota. Masyarakat curiga bahwa keberadaan gereja tersebut justru akan mengundang orang di luar penduduk tersebut untuk berbondong – bonding menjalankan peribadatan di gereja tersebut.

3). Khusus terkait dengan Konflik Demonstrasi Mahasiswa Unis, maka dilihat dari penyebab konflik termasuk dalam jenis konflik sosial yang tergolong ke dalam karena adanya kepentingan. Kepentingan yang dimaksudkan dalam konflik ini terdiri dari kepentingan masyarakat secara umum dan kepentingan dari aktor yang melakukan demonstrasi ini yakni mahasiswa sendiri.

Kebutuhan akan masalah pendidikan dan ketenagakerjaan merupakan kebutuhan publik yang sangat mendasar. Kebutuhan akan pendidikan merupakan hak – hak dasar manusia agar masyarakat menjadi pintar dan terlepas dari belenggu kebodohan. Sedangkan kebutuhan tentang ketenagakerjaan terkait dengan peningkatan kesejahteraan buruh serta perlakuan yang lebih manusiawi terhadap seorang pekerja. Dengan dasar itulah mahasiswa Unis bergerak sebagai bentuk perjuangan moral yang dapat dilakukan. Demonstrasi ini lebih banyak dilakukan di sekitar kampus Unis sendiri dan di beberapa tempat strategis sehingga cukup mengganggu kepentingan masyarakat di dalam berlalu lintas. Bentuk demonstrasi ini merupakan bentuk aktualisasi mahasiswa di dalam keikutsertaanya memperjuangkan hak – hak rakyat.

b. Dilihat dari Jenis konflik

Ketiga jenis konflik sosial yang tergolong besar di atas, dilihat dari jenis konfliknya dibagi dalam dua kelompok. Konflik unjuk rasa buruh perusahaan di Kota Tangerang termasuk dalam jenis konflik antar kelas sosial, sedangkan konflik

penolakan pembangunan gereja dan demonstrasi mahasiswa Unis dapat digolongkan ke dalam jenis konflik politik antar golongan

Secara teoritis, terjadinya kelas-kelas dan golongan – golongan di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Kesemua itu menjadi dasar penempatan seseorang dalam kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan berada pada posisi bawah. Dari setiap kelas mengandung hak dan kewajiban serta kepentingan yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut mampu memicu munculnya konflik rasial.

1). Konflik sosial dalam bentuk Aksi Karyawan Perusahaan di Kota Tangerang adalah merupakan konflik antar kelas sosial yaitu antara buruh sebagai pekerja dengan pengelola perusahaan sebagai pemilik modal. Dalam beberapa kasus antar kelas sosial tersebut menunjukkan buruh selalu diposisikan sebagai pihak yang lemah, sedangkan pihak direksi dan pengelola perusahaan diposisikan sebagai pihak yang kuat. Solusi terbaik dalam kasus ini adalah bagaimana meminimalisir gap yang besar antara buruh di beberapa perusahaan dan pihak direksi atau pengelola dengan cara bagaimana meningkatkan kesejahteraan para buruhnya. Peningkatan kesejahteraan buruhnya ini tidak harus dilakukan secara seketika, melainkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan.

2). Konflik sosial dalam bentuk penolakan pembangunan gereja di Kecamatan Pinang adalah merupakan konflik politik antargolongan dalam Satu Masyarakat. Politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Konflik politik terjadi karena setiap golongan di masyarakat melakukan politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama. Karena perbedaan inilah, maka peluang terjadinya konflik antargolongan terbuka lebar. Khusus terkait dengan kasus konflik penolakan pembangunan gereja di Kecamatan Pinang Kota Tangerang, yang dimaksud dengan politik antar golongan ini terkait

dengan adanya kepentingan yang diperjuangkan, meskipun kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas di wilayah tersebut.

3). Konflik sosial dalam bentuk konflik aksi unjuk rasa mahasiswa Unis juga merupakan konflik politik antargolongan dalam satu masyarakat. Mahasiswa dalam hal ini memposisikan dirinya sebagai sekelompok orang yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, dalam hal ini kelompok masyarakat miskin dan para buruh. Mahasiswa dalam hal ini masih menganggap bahwa masalah pendidikan di Negara kita masih sangat memprihatikan. Pada sisi lain kondisi buruh belum menunjukkan tanda – tanda yang mengarah kepada kesejahteraan. Dengan kondisi tersebut, mahasiswa Unis berkeyakinan bahwa apa yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang benar. Dengan demikian konflik politik antargolongan dalam kasus ini terkait dengan isu dan aspirasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa dengan tujuan agar penyampaian aspirasi tersebut dapat diakomodir oleh pengambil kebijakan yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan ketenagakerjaan.

c. Dilihat dari dampak/akibat dari konflik sosial

1). Dilihat dari dampak/akibatnya, konflik unjuk rasa buruh perusahaan dan konflik demonstrasi mahasiswa Unis, memiliki dampak adanya akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak. Jika setiap pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan seimbang, maka muncullah proses akomodasi. Akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Ketidakseimbangan antara kekuatan-kekuatan pihak yang mengalami konflik menyebabkan dominasi terhadap lawannya. Kedudukan pihak yang didominasi sebagai pihak yang takluk terhadap kekuasaan lawannya.

2). Sedangkan konflik sosial dalam bentuk penolakan pembangunan gereja di Kecamatan Pinang akan mengakibatkan hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Pada konflik ini pada akhirnya akan membawa kehancuran dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak

yang berkonflik mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan pertikaian . Kalau dilihat dari jumlahnya, tentunya masyarakat setempat (Kecamatan Pinang) yang sebagian besar menolak pembangunan gereja tersebut akan melakukan tindakan destruktif apabila panitia pembangunan gereja tersebut melanggar komitmen yang sudah dibuat. Oleh karenanya, tidak urung segala sesuatu yang ada di sekitar menjadi bahan amukan. Peristiwa ini menyebabkan penderitaan yang berat bagi pihak – pihak yang bertikai. Hancurnya harta benda dan bahkan akan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa wujud nyata akibat konflik.

3. Analisa Potensi Konflik dan Pembangunan Perdamaian

Potensi konflik yang terjadi di Kota Tangerang terbagi ke dalam dua kategori: (1) Potensi Konflik sosial sebagai dampak dari konflik besar yang terjadi sebelumnya; (2) Potensi konflik sosial laten yang potensial untuk muncul.

Pertama, potensi konflik sosial sebagai dampak dari konflik besar yang terjadi sebelumnya, misalnya potensi konflik susulan dari ketiga konflik sosial yang dijelaskan di atas, yakni : 1) Aksi Karyawan perusahaan di Kota Tangerang yang Menuntut Kenaikan Gaji; 2) Konflik penolakan pembangunan gereja di Kecamatan Pinang; dan 3) Konflik aksi unjuk rasa mahasiswa Unis. Ketiga konflik sosial di atas masih menyimpan konflik susulan yang akan muncul. Adanya ketidakpuasan dari kalangan buruh beberapa perusahaan di Kota Tangerang, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pinang, dan sebagian besar mahasiswa Unis dan beberapa buruh yang ada di sekitarnya. Artinya bahwa ketiga konflik sosial di atas akan menyimpan potensi konflik yang akan lebih besar yang akan terjadi pada masa – masa yang akan datang.

Kedua, sedangkan potensi konflik sosial laten yang potensial untuk muncul antara lain : (1) Terjadinya potensi konflik yang lebih besar terkait dengan hasil keputusan dari PTUN apabila hakim PTUN menolak permohonan masyarakat yang diwakili oleh Forum Umat Islam Bersatu saat ini sedang mengajukan perkara ke PTUN terkait keluarnya surat IMB terkait pendirian Gereja oleh Walikota Wahidin Halim. Ketika hakim PTUN menolak permohon tersebut dalam arti mengabulkan untuk tetap diberikan ijin dibangunnya gereja tersebut, sangat dimungkinkan

terjadinya konflik yang jauh lebih besar. Masyarakat menganggap bahwa hakim PTUN tidak aspiratif terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Pinang; (2) Keberadaan tempat tinggal yang dijadikan sebagai tempat ibadah, dikhawatirkan terdapat gesekan dengan masyarakat terkait dengan resistensi dari masyarakat.

Beberapa upaya preventif yang perlu dilakukan adalah adanya koordinasi yang intensif antara pejabat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk sama – sama menjaga agar tidak terjadi konflik dalam bentuk penolakan dari masyarakat terkait dengan pembangunan rumah ibadah (gereja) di khususnya di Kecamatan Pinang dan rumah yang dijadikan sebagai tempat peribadatan. Bagi panitia pembangunan gereja maupun pimpinan jemaat di Kecamatan Pinang untuk tidak menonjolkan diri (*show of force*) dalam kegiatan keagamaannya yang justru akan memancing dan memicu konflik sosial dari masyarakat.

4. Peta Rawan Konflik Sosial

Keberadaan peta rawan konflik sosial merupakan sesuatu yang urgen guna lebih memudahkan bagi pengambil kebijakan dalam membuat program antisipasi dalam menangani konflik sosial maupun potensi konflik yang akan muncul pada masa yang akan datang.

Melihat beberapa kasus konflik sosial yang terjadi di Kota Tangerang, maka beberapa wilayah kecamatan yang tergolong rawan konflik sosial berada di beberapa wilayah antara lain : (1) Kasus Aksi Karyawan (buruh) perusahaan berlokasi di hampir sepertiga wilayah Kota Tangerang tersebar di beberapa wilayah antara lain; 1. Pintu tol Bitung; 2. Ruko sastra plaza Blok B No. 36 Jln Gatot subroto Km 4,5 kel Kroncong Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang; 3. Lapangan Ahmad Yani Kota Tangerang; dan beberapa tempat lainnya yang strategis , (2) Konflik penolakan Pembangunan Gereja Santo Bernedet dan penolakan terhadap aktivitas keagamaan sebagian besar berlokasi di Kecamatan Pinang Cipondoh, dan (3) Konflik aksi mahasiswa Unis sebagian besar berlokasi di sekitar Unis di dalam Kota Tangerang.

F. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas di atas, dapat dibuat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Konflik sosial potensial dan memiliki intensitas sosial yang relatif tinggi di Kota Tangerang adalah pada bidang perburuhan dan ketenagakerjaan, penolakan terhadap pembangunan gereja, dan unjuk rasa mahasiswa Unis, sedangkan potensi konflik sosial lainnya yang berhubungan aktivitas keagamaan.
2. Beberapa konflik sosial yang tergolong besar di Kota Tangerang yang dapat dipetakan antara lain: aksi karyawan perusahaan menuntut kesejahteraan pegawai, konflik penolakan pembangunan gereja, dan konflik aksi unjuk rasa mahasiswa Unis.
3. Potensi konflik yang terjadi di Kota Tangerang terbagi ke dalam dua kategori: (1) Potensi Konflik sosial sebagai dampak dari konflik besar yang terjadi sebelumnya; (2) Potensi konflik sosial laten yang potensial untuk muncul pada masa yang akan datang.
4. Potensi konflik sosial sebagai dampak dari konflik besar yang terjadi sebelumnya merupakan potensi konflik susulan sebagai dampak dari ketiga konflik sosial yang terjadi, yakni : 1) Aksi karyawan (buruh) beberapa perusahaan yang menuntut kesejahteraan pegawai; 2) Konflik penolakan pembangunan gereja di Kecamatan Pinang; dan 3) Konflik aksi unjuk rasa mahasiswa Unis Tangerang.
5. Potensi konflik sosial laten yang potensial untuk muncul antara lain : (1) Dikhawatirkan adanya konflik yang lebih besar terkait dengan hasil keputusan PTUN mengenai pembangunan gereja yang tidak sesuai dengan aspirasi sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pinang, dan (2) Keberadaan tempat tinggal yang dijadikan sebagai tempat ibadah, dikhawatirkan terdapat gesekan dengan masyarakat terkait dengan resistensi dari masyarakat.

G. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang dihasilkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan dalam penelitian ini antara lain :

1. Melakukan sosialisasi dini dan penyuluhan terhadap pihak – pihak yang sudah teridentifikasi berkonflik seperti para buruh dan pemilik perusahaan, panitia pembangunan gereja dan masyarakat setempat di Kecamatan Pinang, dan para mahasiswa mengenai aturan – aturan Negara dan daerah yang harus dipatuhi bersama
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat, tokoh daerah, tokoh pemuda dan beberapa pihak terkait melalui pertemuan yang rutin dalam mengantisipasi munculnya konflik sosial yang lebih besar di Kota Tangerang
3. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat umum di Kota Tangerang mengenai bahaya konflik sosial bagi Negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya bagi stabilitas di Kota Tangerang.
4. Melakukan relokasi dalam bentuk pemisahan antara pihak – pihak yang berkonflik agar tidak terjadi benturan fisik yang lebih besar
5. Melakukan mediasi diantara pihak – pihak yang berkonflik untuk mencari solusi dan jalan keluar dari konflik sosial yang telah terjadi
6. Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak – pihak yang berkonflik khususnya yang melanggar aturan Negara dan aturan daerah yang telah dikeluarkan.
7. Melakukan evaluasi dan kajian kembali terhadap segala bentuk kebijakan dan aturan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan, perijinan pembangunan sarana peribadatan, perijinan unjuk rasa di tempat umum, dan beberapa kegiatan keagamaan di Kota Tangerang
8. Melakukan *research* (kajian) lanjutan di dalam memetakan konflik sosial dan menyempurnakan beberapa solusi dalam penanganan konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Dahrendorf, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritik*. Jakarta: CV Rajawali Press.

Furnifall, 1967. *Netherlands india: A Study of Plural Economy*. Cambridge University Press.

Minnery, John R. 1986. *Conflict Management in Urban Planning*. Hampshire, Gower Publishing Company Limited.

Soedjono. 2002. *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Sinar Baru. Bandung.

Soekanto Soerjono. 1989. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta